

PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT MELALUI PENDIDIKAN BUDAYA INDUSTRIAL DI LINGKUNGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Oleh : Siti Irene Astuti D.
(FPIPS IKIP Yogyakarta)

Abstrak

Krisis moneter yang dialami oleh Indonesia mampu menggoncang fondasi ekonomi bangsa Indonesia yang telah dibangun sampai dengan Pelita VI. Prestasi Indonesia yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat secara spektakuler ternyata tidak mampu bertahan dalam menghadapi badai krisis moneter yang hampir dialami oleh semua negara Asia.

Membangun struktur ekonomi yang seimbang dalam suatu negara merupakan prasyarat penting untuk membentuk suatu fondasi ekonomi yang kuat. Posisi ekonomi yang tidak seimbang dalam suatu negara tidak hanya menjadi sumber ketimpangan dan kesenjangan sosial di dalam negara, tetapi juga merupakan sebab dari kerapuhan basis ekonomi negara.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan strategi pembangunan yang harus segera direalisasikan dengan komitmen yang tinggi untuk dapat segera mengatasi masalah krisis ekonomi di Indonesia dan sebagai dasar membangun struktur ekonomi yang lebih kuat.

Keyword : krisis moneter, pemberdayaan ekonomi rakyat.

Pendahuluan

Krisis moneter yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjadi jaminan bahwa basis ekonomi suatu negara dikatakan kuat. Bangunan ekonomi suatu negara harus diakui tidak hanya dibentuk oleh pelaku-pelaku ekonomi yang hanya berpihak pada ekonomi modal kuat melalui pengembangan industri manufaktur. Terbukti bahwa, tidak berimbang posisi pelaku ekonomi di Indonesia merupakan salah satu sumber dari ketimpangan dan kesenjangan struktur ekonomi Indonesia. Hancurnya fondasi ekonomi bangsa Indonesia yang sudah dibangun hingga Pelita VI melalui industrialisasi membuka mata kita, bahwa pentingnya membangun struktur ekonomi yang seimbang dalam suatu negara adalah kekuatan antara kekuatan negara, kekuatan swasta dan kekuatan pribumi (rakyat).

Memikirkan kembali peran penting perekonomian rakyat dalam struktur ekonomi Indonesia harus dibuktikan dan direalisasikan dalam kebijakan ekonomi makro sebagai satu paradigma pembangunan. Persoalannya, mengapa perekonomian

rakyat belum dapat dikembangkan secara maksimal sesuai dengan perannya ? Kendala apa yang dihadapi dalam menerapkan pemberdayaan ekonomi rakyat ?

a. Industrialisasi Sebagai Model Pembangunan

Industrialisasi merupakan salah satu model pembangunan yang diterapkan oleh negara-negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara maju. Ada bukti yang tak dapat disangkal bahwa dinamika pembangunan dengan pertumbuhan yang terjadi di barat pada tahun 1950-an dan awal 1960-an yang tumbuh sangat mengesankan melalui strategi industrialisasi menimbulkan sikap optimisme bagi negara-negara berkembang yang sedang melakukan proses pembangunan. Bertolak dari potret keberhasilan itu dan adanya revolusi dalam ilmu ekonomi yang diciptakan oleh para penganut Keynes yang menekankan pentingnya pembentukan modal telah mengilhami pada pemikir pembangunan dunia ketiga untuk mengambil pola pembangunan yang sama demi mencapai kemakmuran di negaranya.

Industrialisasi sebagai model pembangunan telah membuktikan kemampuannya untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara secara spektakuler, seperti yang telah dicapai oleh negara-negara di Asia dalam kurun waktu 1985-1995, Indonesia bersama-sama Malaysia dan Thailand. Selama kurun waktu tersebut laju pertumbuhan paling tinggi dengan rata-rata 8.2 %, Korea Selatan sekitar 7.8% per tahun, Republik Rakyat China dan Singapura melaju dengan 6.9%, dan untuk Indonesia tumbuh dengan laju rata-rata sekitar 6% atau antara 7.3% hingga 7.5% untuk periode 1993-1995 (Tambunan, 1996).

Namun demikian, krisis moneter yang terjadi saat ini mampu menggoyang struktur ekonomi kita. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa fondasi ekonomi kita sangat rapuh ataukah ada yang salah dalam proses industrialisasi yang diterapkan dinegara kita ? Adalah tepat untuk mengkaji kembali penerangan model industrialisasi sebagai satu model alternatif yang dulunya ditawarkan kepada negara-negara berkembang didalam upaya untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi dengan mengurangi ketergantungan dengan

negara-negara maju ternyata menghasilkan suatu bentuk "ketergantungan" yang semakin membelenggu dunia ketiga?

Adalah tidak mudah untuk mencari sebab utama dari kerapuhan fondasi ekonomi Indonesia. Banyak faktor yang ikut terlibat didalam menciptakan krisis ekonomi, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Faktor intern adalah berkaitan dengan kebijakan ekonomi makro yang sudah diterapkan saat awal industrialisasi diterapkan di Indonesia melalui Industri Substitusi Impor lebih diarahkan pada pengembangan industri manufaktur sehingga banyak sekali industri yang berbasis ekonomi rakyat mengalami kehancuran. Di samping itu, Industri Substitusi Impor yang terlalu diproteksi oleh pemerintah ternyata kurang dapat berdaya saing dengan industri sejenis dari negara lain. Sedangkan, faktor ekstern lebih mengarah pada situasi global yang menyebabkan ketergantungan antar negara satu dan lainnya dalam semua aspek kehidupannya sulit dihindarkan.

Kegagalan Indonesia di dalam mempertahankan fondasi ekonomi yang dibangun atas dasar keberhasilannya untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan kurang memperhatikan masalah pemerataan mengingatkan penulis tentang adanya dua model pembangunan yakni model pertama disebut dengan "*betting on the strong*" atau suatu model pembangunan yang menumpukan harapan keberhasilannya pada partisipasi sekelompok warga atau sekelompok pemilik modal, nasional atau asing, dalam proses pembangunan yang sedang berjalan dalam suatu negara. Asumsi dasarnya adalah bahwa keberhasilan suatu pembangunan akan sangat ditentukan oleh tersedianya modal dan jiwa kewiraswastaan yang memadai dalam masyarakat. Model kedua disebut dengan "*betting on the weak*" atau model ekonomi rakyat menekankan bahwa pembangunan haruslah bertumpu pada kekuatan dan potensi yang dikandung dalam rakyat yakni ekonomi skala kecil dan menengah. Asumsi dasarnya adalah masalah pembangunan di negara sedang berkembang pada hakekatnya bukanlah masalah tersedianya dana pembangunan namun lebih dari itu adalah masalah ketidakmampuan dari pemerintah negara-negara itu untuk menciptakan suatu etika pembangunan yang berwawasan emansipasi terhadap sistem perekonomian dari warisan kolonial (Soetrisno, 1991:33).

Jika dikaitkan dengan ke dua model tersebut jelas bahwa Indonesia cenderung menerapkan model yang pertama dengan alasan yang cukup rasional. Sebagaimana dituliskan oleh Loekman Soetrisno, bahwa model pertama lebih memungkinkan untuk

tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang pertama dengan alasan yang cukup rasional. Sebagaimana dituliskan oleh Lukman Soetrisno, bahwa model pertama lebih memungkinkan untuk tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, dengan harapan bahwa keberhasilan didalam membangun ekonomi akan dapat merembes ke semua lapisan. Sedangkan model kedua kurang diminati karena prosesnya lamban dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Model pertama, dalam kenyataannya tidak dapat menciptakan pemerataan dalam kehidupan masyarakat. Hal itu terjadi, karena dalam proses penerapan model pertama, dalam proses pembangunannya menerapkan proses seleksi yang diskriminatif yang berakibat bahwa ekonomi rakyat kalah bersaing dengan ekonomi konglomerasi (1991:35).

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa untuk membangun ekonomi rakyat perlu lebih mengembangkan model yang kedua, sebagaimana yang sudah diterapkan Republik Cina-Taiwan yang memberikan perhatian penuh pada pembangunan pertanian dan pedesaan dengan tujuan untuk membebaskan rakyat pedesaan dari kemiskinan ternyata menunjukkan hasil yang menakjubkan yakni dengan terkikisnya kemiskinan di pedesaan dan berhasil menciptakan pemerataan yang pada gilirannya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Penulis sependapat dengan tulisan Loekman Soetrisno yang menyatakan bahwa *pemerataan pembangunan adalah suatu insentif psikologis* bagi rakyat untuk keluar dari belenggu ekonomis dan non-ekonomis yang menghambat kemauan dan kemampuan mereka guna menciptakan pertumbuhan nasional (1991:35).

b. Masalah Sosial-Budaya dalam Proses Industrialisasi

Masalah sosial budaya yang terjadi di Indonesia didalam memasuki era industrialisasi dapat dilihat dari dua sisi, pertama yang terjadi di dalam tubuh masyarakat, dan kedua, yang terdapat di dalam tubuh Negara dan Aparatur Negara (Soetrisno, 1994:8).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang tercermin dari rendahnya rata-rata pendidikan merupakan salah satu sumber masalah sosial budaya bangsa Indonesia. Akibat pendidikan yang rendah maka produktivitas pun cenderung rendah. Persoalannya, apakah benar bahwa tinggi rendahnya produktivitas hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan?

Sebagai salah satu bukti banyak manusia Indonesia yang mempunyai pendidikan tinggi ethos

kerja mereka lebih rendah dari petani yang bekerja harian. Sejarah juga membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sejak lama telah mengenal "kelompok pengusaha mandiri" yang terdiri dari wirausaha kecil dengan modal kecil secara mandiri mendirikan usaha mereka, sebagai contohnya para pengusaha batik yang tergabung dalam Sarikat Dagang Islam.

Tulisan menarik tentang peran perekonomian rakyat di masa lalu ditulis oleh Peter Boomgaard sebagai pakar sejarah dalam bukunya "*The Non-Agricultural Side of An Agricultural Economy Java, 1500-1990*" mampu menggambarkan peran penting perekonomian bangsa Indonesia. Adapun catatan penting dari Boomgaard bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat "*nir teknologi*" atau masyarakat yang asing dengan IPTEK, seperti: industri perkapalan, industri tekstil. Persoalannya, mengapa kemudian berkembang satu situasi di Indonesia di mana masyarakat seperti kehilangan kemampuan teknologis dan kewirausahaan mereka?

Sebagaimana diulas oleh Loekman Soetrisno (1994:5), untuk menjawab masalah tersebut di atas para sosiologi menggunakan konsep "deindustrialisasi" suatu masyarakat. Konsep ini menjelaskan suatu proses di mana suatu masyarakat kehilangan usaha-usaha ekonomi pertanian yang bersifat proto-industri dalam masyarakat itu sebagai akibat dari suatu kebijakan pemerintah.

Industri perkapalan di Jawa mati karena kebijaksanaan tentang kehutanan yang dikeluarkan oleh Gubernur Dandelees dan kemudian terus diberlakukan oleh pemerintah Belanda yang melarang penebangan kayu jati di pulau Jawa. Demikian pula banyak industri tekstil pribumi yang dibuat tak berdaya melawan persaingan tekstil impor dari industri tekstil twente Belanda. "De-industrialisasi" perekonomian Indonesia oleh berbagai kebijakan perekonomian pemerintah Belanda menyebabkan timbulnya dalam masyarakat Indonesia yakni "functional dualism". Dualisme fungsional sebagaimana dijelaskan oleh A.G. Frank, di mana sektor ekonomi tradisional diberi fungsi terbatas yaitu penyedia lahan dan tenaga murah bagi sektor modern yang didominasi oleh usaha perkebunan dan usaha lain yang bersifat ekstraktif seperti usaha pertambangan. Karena sektor pertanian diberi fungsi terbatas sebagai penyedia tanah dan buruh yang murah maka pendukung sektor ini tergantung pada perkebunan dan pertambangan sebagai buruh (Soetrisno, 1994:6).

Adalah menarik bahwa dualisme fungsional terus berkembang hingga sekarang dengan menampakkan bentuknya yang agak berbeda. Industrialisasi yang bertumpu pada industri manufaktur

telah mampu menggeser peran industri kecil dan rumah tangga yang pernah menjadi basis perekonomian rakyat Indonesia. Sebagai akibatnya, dalam masyarakat yang berkembang dualisme fungsional ini menimbulkan suatu "abnormalitas" dalam perkembangan masyarakat pedesaan. Mengkaji tulisan Loekman Soetrisno yang melihat gejala "abnormalitas" yang menyebabkan terjadinya "misbirth" atau diartikan sebagai "kelahiran cacat". dalam konteks ekonomi, Indonesia mengalami "dualisme fungsi", sedangkan dalam konteks budaya kita menderia "budaya banci". "Kebancian budaya" pada akhirnya merasuk dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang ditandai dengan dasar ekonomi kita yang tetap bertahan dengan azas kekeluargaan, sementara itu juga menjamurnya monopoli. Akibatnya sistem perekonomian Indonesia menjadi tidak jelas apakah kapitalisme atau sosialisme atau tidak kedua-duanya?

Negara dan aparatnya merupakan suatu perangkat penting dalam mendorong proses industrialisasi yang bermutu di Indonesia. Masalahnya, mereka tidak selalu menyadari peran penting yang harus dijalankan dalam kedudukannya sebagai abdi negara. Untuk dapat membentuk peran penting tersebut, diperlukan tiga jenis nilai yang harus disosialisasikan ke dalam diri abdi negara. Pertama, negara dan aparatnya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam melayani masyarakat. Kedua, negara dan aparatnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya demokrasi dalam berinteraksi dengan rakyatnya. Ketiga, sikap terhadap pentingnya "division of labour" dalam bernegara. (Soetrisno, 1994:10)

Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa sesungguhnya proses industrialisasi tidak hanya mengacu pada proses perubahan bentuk ekonomi, tetapi proses perubahan nilai-nilai sosial budaya di dalam masyarakat merupakan prasyarat penting untuk dapat menciptakan keberhasilan proses industrialisasi yang emansipatif. Adapun bentuk dari masyarakat industri adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan industrial yang bercirikan: 1). *rasionalitas tinggi*, dalam arti kemampuan manusia untuk melihat segala fenomena yang ada di dalam konteks objektivitas ilmiah, 2). *kreativitas tinggi*, 3). *commitment* dalam arti tekad untuk menyelesaikan masalah dengan tuntas dan mempertahankan sesuatu yang dianggap dan dirasakan benar, 4). adanya tingkat obyektivitas pelaksanaan dan ketaatan pada hukum yang tinggi, 5). kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan (Soetrisno, 1995:161).

Keberhasilan untuk menciptakan budaya industrial itu sendiri sangat ditentukan oleh keinginan dari pemerintah didalam menerapkan sistem yang

demokratis. Di samping itu, sistem pemerintahan yang demokratis sangat diperlukan didalam menangani berbagai eksekusi yang disebabkan oleh proses transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Prasyarat lainnya, adalah berkembang moral ekonomi di kalangan para pelaku ekonomi adalah mutlak untuk kemudian dapat menciptakan suatu masyarakat yang dipimpin oleh "clean goverment".

c. Kendala Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Paradigma Alternatif

Paradigma pembangunan yang meletakkan peranan negara / pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan dalam kenyataannya kurang berhasil untuk mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Kegagalan didalam mengadopsi model pembangunan dari negara-negara maju untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang disebabkan oleh kurang kesempatan pada rakyat miskin ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, dan kemudian pelaksanaan program pembangunan (Soetrisno, 1996).

Model Pemberdayaan atau *Empowerment* merupakan model alternatif yang ditawarkan oleh para ahli pembangunan di dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Konsep memberdayakan masyarakat adalah suatu konsep politik yang bertujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang antara masyarakat dan negara, antara si kaya dan si miskin, yang semula tidak seimbang. Sebagaimana dijelaskan oleh Loekman soetrisno, pemberdayaan masyarakat diartikan juga penataan kembali penguasaan dan akses kelompok atau perorangan terhadap faktor-faktor produksi dalam masyarakat. Ciri politis "empowerment" adalah adanya kebijaksanaan atau toleransi politik.

Model "empowerment" dapat dilihat dari dua versi yang berbeda, dan perbedaan ini akan mempengaruhi strategi yang akan dipakai dalam pelaksanaan pembangunan. Kedua versi "empowerment" tersebut adalah versi dari *Paul Freire* dan versi yang berasal dari *Schumacher*. Persamaan antara kedua versi itu terletak pada penekanan akan pentingnya setiap agen pembangunan untuk bekerja sama dengan kelompok penduduk setempat untuk pembangunan masyarakat mereka sendiri. Adapun yang membedakan kedua versi itu terletak pada analisa dan metodologi yang digunakan pada masing-masing model. (Soetrisno, 1997).

Versi Paulo Freire berinti pada metodologi

conscientization yakni suatu proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik yang ada dalam suatu masyarakat dan menyusun cara untuk menghilangkan kondisi yang operatif itu di dalam masyarakat. Bagi Paulo Freire, *empowerment* bukanlah sekedar memberi kesempatan rakyat menggunakan sumber alam dan dana pembangunan saja, tetapi hal itu merupakan upaya mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Dengan kata lain, *empowerment* berarti partisipasi masyarakat dalam politik.

Sementara itu versi Schumacher tentang "empowerment" kurang menyentuh aspek politik. Dia percaya bahwa manusia pada dasarnya mampu untuk membangun diri mereka sendiri tanpa harus menghilangkan ketimpangan struktural yang ada dalam masyarakat. Schumacher menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk menolong si miskin adalah "memberi kail daripada ikan" dengan demikian mereka dapat mandiri. Schumacher sangat memberi tempat yang istimewa pada kelompok NGO dalam proses pembangunan.

Bagi Indonesia, penerapan kedua versi tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Oleh karena itu, jika "empowerment" dipilih sebagai suatu strategi alternatif pembangunan haruslah memiliki unsur transformatif dalam pelaksanaannya. Tanpa ada unsur transformatif boleh jadi pemberdayaan rakyat hanyalah sebuah slogan yang tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial di Indonesia (Soetrisno, 1997).

Upaya-upaya rasional didalam menerapkan konsep pemberdayaan rakyat dalam proses pembangunan merupakan suatu tindakan penting. Hal ini mengandung arti bahwa pemahaman terhadap kendala-kendala di dalam masyarakat perlu diatasi. Sebagaimana ditulis oleh Loekman Soetrisno bahwa masih berkembangnya azas "**the Government can not do wrong**" menyebabkan sikap akomodatif dan bertanggung jawab di kalangan aparat negara sulit ditumbuhkan. Padahal, sebagai suatu konsep politik memberdayakan rakyat berarti menata kembali hubungan antara negara dan rakyat dan antara kaya dan miskin, dan bukan hanya sekedar memberi kail pada masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan rakyat tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh adanya suatu sistem politik dan ekonomi yang demokratis (1997).

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi rakyat, maka upaya-upaya untuk mengembangkan peran industri kecil dan menengah dalam struktur perekonomian negara diperlukan suatu sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk

mendukung situasi demokratis tersebut pembenahan yang harus dilaksanakan harus dilakukan pada dua sisi yakni di dalam lingkungan industri kecil dan menengah dan yang lebih penting adalah terciptanya nilai demokratis dalam pemerintahan. Bagi industri kecil dan menengah, peningkatan manajemen yang berlandaskan pada budaya industrial harus sudah tersosialisasikan didalam aktivitas produksinya. Adapun dari pihak pemerintah yang perlu diciptakan adalah sifat "keterbukaan", rasa tanggung jawab tinggi, dan siap menerima kritik merupakan sebagian dari prasyarat penting di dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, keberhasilan didalam menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sangat didukung oleh terlaksananya moral ekonomi di kalangan pelaku ekonomi dengan meletakkan pada motivasi yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di semua lapisan sosial.

Pada akhirnya, kita harus mengakui bahwa paradigma pembangunan yang berpihak pada peningkatan kehidupan masyarakat dan bukan untuk sekelompok orang haruslah bersifat emansipatif. Catatan menarik yang pernah ditulis oleh Loekman Soetrisno (1995), bahwa pembangunan yang emansipatif memerlukan beberapa persyaratan sebagai berikut : *Pertama*, adanya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. *Kedua*, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab maka harus ada pertimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif, dan jugikatif. Dengan kata lain *Trias Politica* haruslah menjadi dasar dari suatu sistem pemerintahan suatu bangsa yang ingin melihat pembangunan negerinya menjadi pembangunan yang emansipatif. Demikian halnya, dalam era globalisasi suatu pembangunan yang emansipatif haruslah didukung oleh suatu nasionalisme ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan terhadap produk-produk dalam negeri. Karena pembangunan emansipatif harus mampu menciptakan pasar dalam negeri yang kuat bagi produk dalam negeri.

KESIMPULAN

Ketimpangan didalam struktur ekonomi disebabkan oleh penerapan model pembangunan yang lebih menekankan pada pencapaian tingkat pertumbuhan daripada pencapaian pemerataan.

Masalah sosial budaya yang menghambat di dalam proses industrialisasi di Indonesia bersumber dari masyarakat dan aparaturnegara. Terjadinya "de-industrialisasi" merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Indonesia kehilangan kemampuan teknologi yang pernah dimiliki pada masa lalu.

Pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai salah satu cara untuk membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari tubuh masyarakat maupun di dalam tubuh negara dan aparaturnegara. Terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dengan menekankan pada pembangunan yang emansipatif merupakan salah satu faktor pendukung untuk dapat membangun ekonomi rakyat yang berbasis pada peran industri kecil dan menengah yang sangat diperlukan untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat didalam struktur perekonomian Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Soetrisno, Loekman. (1991). *Peran Industri Kecil Batik di Indonesia Sebagai Wahana Pembangunan Pedesaan dan Masalahnya*, Makalah : Seminar Nasional Pedesaan dalam rangka Lustrum Universitas wangsa Manggala Yogyakarta.
- . (1994). *Moral Ekonomi Indonesia*. Makalah : Pelatihan kepemimpinan Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Yogyakarta.
- . (1994). *Masalah Sosial Budaya di Indonesia Menjelang Indonesia memasuki Masyarakat Industri*, Makalah : Transformasi Sosial Pada Masyarakat Semi Industri di Yogyakarta.
- . (1995). *Sejarah Perekonomian Rakyat Indonesia dari Masa ke Masa*, Makalah : Seminar Ekonomi Rakyat dan Paradigma Pembangunan di Jakarta.
- . (1995). *Mencari Paradigma Pembangunan Yang Membebaskan*, Makalah : Pembangunan Indonesia 2000 Universitas Brawijaya Malang.
- . (1996). *Memberdayakan Rakyat Dalam Pembangunan Indonesia*, Makalah : Diskusi Panel Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus. *Daya Saing Perekonomian Indonesia : Menyongsong Era Pasar Bebas*, Media Ekonomi Publishing, Jakarta.